

**SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA SERTA NILAI-NILAI
DAN IMPLEMENTASI PANCASILA**

Akdila Bulanov¹, Sisri Wahyuni², Yeri Dea Putri³, Nurul Putri Suci Hakim⁴, Regita Prahma Suci⁵, Putri Amelia⁶, Ridhatul Husni⁷, Zahwa Aulia⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: akdilabulanov@uinbukittinggi.ac.id¹, sisriwahyuni495@gmail.com²,
yerideaputri38@gmail.com³, nurulputrisuci04@gmail.com⁴,
regitaprahmasuci9@gmail.com⁵, putriamelia6894@gmail.com⁶,
ridhatulhusni5@gmail.com⁷, zahwaaulia2707@gmail.com⁸

Abstract

Pancasila is the foundation of the state and the ideology of the Indonesian nation which has an important role in social, national, and state life. Pancasila was born through a long historical process during the preparation period for Indonesian independence, starting from the BPUPKI sessions until it was officially ratified by PPKI on August 18, 1945 as the foundation of the Republic of Indonesia. The values contained in Pancasila originate from the culture, traditions, and social life of Indonesian society that have existed for a long time, making Pancasila a guideline for the nation in maintaining unity, justice, and social welfare. This article aims to discuss the history of the birth of Pancasila, the values contained in each principle, and the implementation of Pancasila in everyday life. The method used in this article is a literature study method using sources from books, journals, and scientific documents related to Pancasila. The results of the discussion show that the values of Pancasila include divinity, humanity, unity, democracy, and social justice which can be applied in daily life through attitudes of tolerance, mutual cooperation, deliberation, respecting the rights of others, and maintaining national unity. By understanding the history, values, and implementation of Pancasila, society, especially the younger generation, is expected to be able to apply Pancasila values in everyday life in order to create a harmonious, just, and prosperous society in accordance with the ideals of the Indonesian nation.

Keywords: *Pancasila, History of Pancasila, Pancasila Values, implementation of Pancasila*

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang pada masa persiapan

kemerdekaan Indonesia, dimulai dari sidang BPUPKI hingga akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang telah berkembang sejak lama, sehingga Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk membahas sejarah lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, serta implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka dengan menggunakan sumber dari buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan Pancasila. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, gotong royong, musyawarah, menghormati hak orang lain, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan memahami sejarah, nilai, dan implementasi Pancasila, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Kata kunci: *Pancasila, Sejarah Pancasila, Nilai Pancasila, Implementasi Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan sosial, serta pembangunan nasional. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan panjang

bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Selama lebih dari tiga setengah abad, bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan bangsa asing yang menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, dan perpecahan di berbagai wilayah Nusantara. Kondisi tersebut melahirkan kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa sebagai kekuatan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kesadaran tersebut kemudian berkembang menjadi semangat nasionalisme yang mendorong para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam

suku, agama, budaya, dan golongan.

Proses perumusan Pancasila berlangsung melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka, di antaranya Muhammad Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan lima asas yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan lima prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut kemudian diberi nama "Pancasila".

Pancasila pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang pemikiran, baik nasionalis, religius, maupun golongan lainnya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi konsensus nasional yang mampu menyatukan perbedaan demi terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan negara, tetapi

juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya, serta menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada era modern. Dengan memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda dapat semakin menghayati serta mengamalkan Pancasila sebagai identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang membahas sejarah lahirnya Pancasila, nilai-nilai Pancasila, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu membaca, memahami, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber yang relevan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, yaitu sejarah lahirnya Pancasila, nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses lahirnya Pancasila, makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

C. HASIL PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila itu lahir melalui proses yang sangat panjang beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya dari zaman kerajaan dan penjajahan berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa.

Sebagai falsafah negara, tentunya pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah swt. dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia dimasa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, maupun sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-

hari dan yang jelas telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara republik Indonesia (Saidurrahman & Arifinsyah, 2020).

Selain menjadi cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi mengatur jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Menurut KBBI, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. M. Syamsudin menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dapat dipahami melalui aspek budaya, sejarah, filsafat, dan hukum.

Dari sisi budaya, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sisi sejarah, Pancasila dirumuskan untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka dengan berlandaskan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, secara yuridis, Pancasila memiliki kedudukan kuat karena tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku (Marzuki et al., 2025).

Adapun Istilah "Pancasila" Pertama kali dapat ditemukan dalam buku "Sutasoma" yaitu karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman majapahit (abad ke-14). Dalam buku itu istilah Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya lima atau yang biasanya disebut Pancasila karma dan berisi lima larangan untuk:

1. Membunuh (Mateni)

2. Mencuri (Maling)

3. Berzina (Madon)

4. Mabuk minuman keras (Mabok)

5. Berjudi (Main)

Selanjutnya secara umum, istilah "Sila" sendiri merujuk pada aturan tingkah laku, norma, atau akhlak yang mendasari perbuatan seseorang atau suatu bangsa. Dalam proses kemerdekaan, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara pada Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei – 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei sidang dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon. Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui yang nampak hanya 3 teks pidato yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Sukarno.

Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945) dalam pidatonya, beliau mengusulkan lima asas bagi Indonesia merdeka, yaitu:

1. kebangsaan

2. Peri kemanusiaan.

3. Peri ketuhanan.

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan rakyat

Soepomo (31 Mei 1945) beliau memaparkan gagasan mengenai fondasi negara Indonesia dalam sebuah pidato. Beliau menekankan konsep negara Integralistik (negara Persatuan) sebagai aliran pikiran

utama untuk dasar negara kebangsaan. Lima usulan Soepomo yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Ir. Soekarno (1 Juni 1945). Dalam sidang BPUPKI, Ir. Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah "Pancasila" sebagai dasar negara. Lima Poin yang beliau usulkan meliputi:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial dan
5. Ketuhanan yang berkemanusiaan.

Jadi, secara historis Pancasila lahir 1 juni 1945. Sedangkan secara yuridis Pancasila lahir tanggal 18 Agustus 1945 (Jakni, 2019).

Setelah Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara pada 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI pun selesai. Selanjutnya, ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas menyusun kembali gagasan-gagasan Soekarno tentang dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila.

Panitia kecil tersebut kemudian memilih sembilan orang tokoh yang dikenal sebagai Panitia Sembilan. Anggotanya terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad

Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Moh. Hatta, dan Agus Salim dengan Soekarno sebagai ketuanya.

Pada sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno menyampaikan bahwa Panitia Sembilan telah berhasil merumuskan dasar negara pada 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta memuat lima dasar negara, yaitu

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,
2. kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. persatuan Indonesia,
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Octavionica et al., 2023).

Piagam Jakarta menunjukkan keberhasilan BPUPKI dalam merumuskan dasar negara. Namun, isi rumusan tersebut masih perlu disesuaikan agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama maupun golongan. Oleh sebab itu, hasil kerja BPUPKI kemudian dibahas kembali oleh PPKI setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian, BPUPKI memiliki peranan penting dalam merancang dasar dan ideologi negara yang kemudian disempurnakan serta

disahkan oleh PPKI.

Sesudah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI sekaligus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, diambil beberapa keputusan penting, yaitu mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga legislatif sementara.

Peristiwa penting lainnya adalah perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan toleransi agar dasar negara dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia bagian Timur yang mayoritas non-Islam.

Perubahan tersebut

menunjukkan sikap bijaksana dan semangat persatuan para pendiri bangsa dalam menjaga keutuhan negara. Dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya hasil pemikiran para tokoh bangsa, tetapi juga merupakan kesepakatan nasional seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bersama dalam negara yang merdeka, berdaulat, dan adil (Wahyuni et al., 2025).

Pancasila merupakan hasil penggalan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sebenarnya telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat istiadat, budaya, dan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Kemudian, nilai-nilai itu dirumuskan menjadi lima dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Sukarno dalam sidang BPUPKI. Setelah melalui berbagai tahapan dan pembahasan, Pancasila akhirnya dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan resmi disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 (Darmawati et al., 2024).

Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar moral dan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Berikut penjelasannya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilar utama yang menggambarkan keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai landasan spiritualitas dan moralitas. Konsep ini tidak hanya sekadar menggarisbawahi kepercayaan pada keesaan Tuhan, tetapi juga menegaskan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan-Nya sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan yang ada di alam semesta. Ketuhanan Yang Maha Esa memperkuat kesadaran akan eksistensi yang lebih besar daripada diri sendiri, mengajarkan rasa hormat, dan menegaskan ketergantungan manusia pada kekuatan ilahi yang mengatur segala aspek kehidupan. Dengan mengakui dan menginternalisasi nilai ini, individu diberi landasan moral yang kuat untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma kebaikan. Pentingnya menjunjung tinggi kepercayaan akan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan keadilan juga mencerminkan nilai penghormatan, kesetiaan, dan kewajiban terhadap prinsip-prinsip etis yang melandasi tindakan individu dalam konteks sosial dan spiritual.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menyoroti esensi

kesetaraan, keadilan, serta martabat manusia dalam seluruh interaksi sosial. Konsep ini tidak hanya sekadar menekankan pentingnya aspek-aspek tersebut, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dasar dalam memperlakukan sesama dengan adil, menghormati hak asasi manusia, dan berperilaku beradab dalam segala aspek kehidupan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memperkuat kesadaran akan pentingnya menghargai nilai-nilai universal yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang, agama, atau status sosial. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan berbudaya. Sikap adil, kesetaraan, dan beradab dalam berinteraksi mencerminkan kedewasaan moral dan etika yang mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan bagi semua pihak.

3. Persatuan Indonesia

Nilai ketiga, Persatuan Indonesia, memperlihatkan urgensi dari kesatuan dalam konteks keberagaman yang melimpah. Konsep ini tidak hanya menyoroti pentingnya aspek tersebut, tetapi juga

menekankan semangat kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sebagai landasan utama bagi keutuhan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia menjadi landasan yang kokoh untuk memahami bahwa dalam perbedaan terdapat kekuatan, bahwa dalam keberagaman terdapat kekayaan yang tak ternilai harganya. Nilai ini mengajarkan arti pentingnya memelihara semangat kebersamaan, saling memberi dukungan dalam gotong royong, dan menjunjung tinggi sikap solidaritas sebagai pondasi utama bagi kelangsungan negara. Dengan memahami nilai-nilai ini, masyarakat dapat memperkuat jalinan persaudaraan, merawat kerukunan antarwarga, serta memupuk rasa saling menghormati dan mendukung. Semangat kesatuan dalam keberagaman mencerminkan kedewasaan sosial serta toleransi yang diperlukan untuk membangun bangsa yang kuat dan maju secara bersama-sama. Solidaritas dan gotong royong menjadi pilar yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Indonesia sebagai satu kesatuan yang teguh dalam perbedaan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan esensi utama dari demokrasi, partisipasi aktif rakyat

dalam proses pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsep ini tidak hanya menyoroti pentingnya aspek demokrasi dan partisipasi rakyat, tetapi juga menegaskan kebutuhan akan kearifan dan kecerdasan dalam pengelolaan pemerintahan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan panggung bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis, melalui perwakilan yang bijaksana dan berkeadilan. Nilai ini memperkuat konsep bahwa keberhasilan suatu negara terletak pada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, masyarakat menjadi agen perubahan yang berdaya, memiliki suara dalam pemerintahan, dan berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkeadilan. Kehadiran demokrasi yang sehat, partisipasi yang aktif, serta kebijaksanaan dalam tindakan pemerintah menciptakan sistem yang responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mencerminkan kedewasaan politik serta keadilan dalam menjalankan roda pemerintahan.

5. Keadilan Sosial

Nilai kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mendemonstrasikan urgensi dari

upaya pemerataan, keadilan ekonomi, serta perlindungan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Konsep ini tidak hanya menyoroti kepentingan aspek-aspek tersebut, melainkan juga menegaskan perlunya penanganan kesenjangan sosial dan ekonomi guna meraih kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memperkuat kesadaran akan pentingnya kesetaraan akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang bagi setiap individu dalam masyarakat. Nilai ini menekankan perlunya menciptakan sistem yang memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kesejahteraan yang merata menjadi tujuan bersama yang dapat dicapai melalui upaya bersama dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya, di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan

yang sama untuk meraih kesejahteraan.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat Indonesia. Pendidikan, kebijakan publik, kehidupan sosial, hukum, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan beberapa bidang di mana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat terlihat secara nyata. Dalam bidang pendidikan, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat (Darmawati et al., 2025).

Di bidang kebijakan publik, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, semangat persatuan, gotong royong, dan solidaritas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung

antarindividu dan antarkepala keluarga di masyarakat.

Dalam bidang hukum, penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila, beretika, dan bertanggung jawab menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang berdaya saing, berbudaya, dan berkeadilan. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara holistik dalam pembangunan manusia Indonesia. Dengan memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat memperkuat jati diri bangsa, membangun solidaritas sosial, serta menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkepribadian, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan konstitusi negara.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Percaya dan takwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

- b. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
 - c. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama.
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari.
 - d. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain.
 - e. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - f. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
 - a. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi.
 - b. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
 - c. Menumbuhkan rasa cinta tanah air

- dan semangat kebangsaan.
- d. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia.
4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan
- a. Mendahulukan kepentingan bersama dan negara.
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan semangat gotong royong.
- b. Bersikap adil kepada semua orang.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak-hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- f. Tidak melakukan perbuatan yang

merugikan kepentingan umum (Jakni, 2019).

Selain itu nilai-nilai Pancasila diimplementasikan pada pembangunan sosial, politik, dan budaya Indonesia.

1. Pendidikan Berbasis Pancasila

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan merupakan langkah krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki cinta tanah air, menghargai keberagaman, serta teruji kesadaran moralnya. Dengan mengadopsi kurikulum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, siswa tidak hanya diajak untuk mengenal, tetapi juga menghayati nilai-nilai luhur seperti persatuan, keadilan, dan gotong royong. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori, melainkan menjadi pondasi yang kokoh dalam membentuk kepribadian yang utuh, berintegritas, serta bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, siswa tidak hanya diajarkan materi akademis, tetapi juga ditanamkan dengan nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang bersifat inklusif. Mereka belajar untuk menghormati perbedaan, menghargai pluralitas, serta memupuk semangat persatuan dalam keberagaman. Melalui pendidikan yang berbasis Pancasila, generasi muda dilatih untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Pendidikan yang terpatri dengan nilai-nilai Pancasila juga

membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan karakter yang kuat. Siswa diajak untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi juga mengalami nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial mereka. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan menjadi landasan yang kokoh dalam mempersiapkan generasi penerus yang memiliki identitas nasional yang kuat, berkepribadian, dan berdaya saing global.

2. Kebijakan Publik yang Berlandaskan Pancasila

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik mengarah pada upaya menciptakan kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Dengan memastikan bahwa kebijakan publik berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

3. Kehidupan Sosial yang Harmonis

Semangat persatuan, gotong royong, dan solidaritas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pilar, melainkan juga tiang yang kokoh dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

melalui prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Pancasila, masyarakat di beri landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman, serta memberikan dukungan secara bersama-sama saat di hadapkan pada keberagaman tantangan. Pancasila memperkuat semangat semangat kebersamaan diantara individu-individu yang berbeda, merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dengan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan, masyarakat diajarkan untuk saling menghormati, bekerja sama dalam semangat gotong royong. Dan menunjukkan solidaritas dalam situasi suli. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan moral yang kuat dalam interaksi sehari-hari, menciptakan ikatan sosial yang erat di antara anggota masyarakat. Dalam konteks keberagaman yang kaya. Pancasila menjadi landasan yang melintasi perbedaan dan menjadi jembatan yang menghubungkan beragam elemen masyarakat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, masyarakat di berdayakan untuk membangun toleransi, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam kerangka yang inklusif dan menyatukan visi bersama. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi praktik yang mengubah perilaku dan pola hubungan antar waktu dalam masyarakat. Dari sini

terbentuklah fondasi yang kuat untuk memperkuat keharmonisan, keberagaman, serta solidaritas dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya.

4. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi semua, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan , negara dapat memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warganya.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkarakter Pancasila

Pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya, beretika, dan bertanggung jawab. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, Indonesia dapat memperkuat moral dan etika yang

menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Implementasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan memastikan kemajuan yang berkelanjutan.

Pancasila juga merupakan fondasi ideologi negara yang sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945. Menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara sesuai dengan landasan yang tertera di dalamnya. Pancasila menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia untuk bisa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Tanpa kejelasan dari tujuan, dasar, dan nilai-nilai pancasila, indonesia pasti akan kesulitan dalam menjalankan sistem ideologi negaranya secara efisien, karena pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara atau, berfungsi sebagai pengikat dari keberagaman yang ada baik itu, perbedaan agama, suku bangsa, dan Bahasa. Pelaksanaan pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Pancasila memiliki arti sebagai lima prinsip dasar yang utama menjadi dasar kehidupan berbangsa

dan bernegara di Indonesia, yang diharapkan tercermin dalam perilaku yang bermoral (Darmawati et al., 2024).

Mahasiswa dalam konteks ini juga banyak dalam berperan yang sangat penting dan juga relevan. Dapat diuraikan peran mahasiswa dalam lima nilai Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap individu memiliki hak untuk mengamalkan keyakinannya masing-masing dalam beribadah kepada tuhan yang maha esa. Sebagai mahasiswa, kita dapat mempromosikan toleransi agama untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mengurangi potensi konflik. Contohnya adalah dengan cara menghormati perbedaan agama yang ada dan menunjukkan sikap toleransi atau empati antar umat beragama demi memperkuat solidaritas dan dukungan Bersama. Mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami dan menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia. Serta melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka juga dapat berperan sebagai agen perdamaian antar umat beragama di lingkungan kampus.

2. Yang Adil Dan Beradap

Ini berarti kita saling menunjukkan kasih sayang, tidak memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan, berani memperjuangkan kebenaran dan

keadilan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Sebagai contoh, sebagai mahasiswa kita harus bersikap ramah terhadap sesama di dalam maupun diluar lingkungan kampus, dan ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam, menggalang dana untuk korban gempa, dan lainnya. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memperjuangkan keadilan sosial, menghormati martabat manusia, dan berperilaku santun dalam interaksi kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kampus.

3. Persatuan Indonesia

Kita perlu mengikuti semangat persatuan indonesia, yang tercermin dalam prinsip bhineka tunggal ika, dan tidak boleh melakukan Tindakan diskriminasi terhadap perbedaan yang ada untuk mencegah siswa papua dari dampak rasisme. Meskipun kita memiliki perbedaan, kita tetap Bersatu sebagai bangsa negara indonesia. Sikap siswa yang menghargai kebangsaan dan cinta tanah air itu sangat penting, Dimana kepentingan bangsa selalu di tempatkan di atas kepentingan pribadi. mahasiswa memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa indonesia tanpa harus memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Mereka dapat menginiasi kegiatan yang memperkuat rasa persatuan diantara sesama mahasiswa dan masyarakat

sekitarnya.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Setiap keputusan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat harus dicapai melalui musyawarah, mengingat masyarakat Indonesia mengamalkan prinsip demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk kebebasan dalam berpendapat. Sebagai mahasiswa yang berintelektual, kita harus menghindari pemaksaan pendapat kepada orang lain dan selalu mengutamakan refleksi, terutama saat dalam berpartisipasi dalam kegiatan forum, serta menghormati hasil dari proses refleksi tersebut. Prinsip keempat dalam Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menggambarkan inti dari prinsip demokrasi. Mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam setiap proses demokrasi di kampus, seperti pemilihan umum mahasiswa, dan menyuarakan aspirasi melalui forum musyawarah atau lembaga perwakilan dari mahasiswa.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kita perlu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menghindari memaksakan pandangan kita kepada orang lain, serta mengutamakan semangat solidaritas dan kolaborasi dalam kehidupan bersama. Sebagai

siswa, kita harus menghormati nilai-nilai kebersamaan, menghargai sudut pandang orang lain. Mahasiswa diharapkan untuk memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan sosial, advokasi, atau pelayanan masyarakat untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan. Seseorang yang merugikan orang lain baik melalui tindakan maupun perilaku akan dikenakan sanksi hukuman, menegaskan pentingnya saling menghargai satu sama lain.

Dengan memahami dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam perubahan yang bersifat positif dan mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila yang lima. Ini juga berarti bahwa ketika mahasiswa benar-benar memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, demokrasi, kesetaraan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka juga dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus atau masyarakat. Mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak perubahan bangsa dengan menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan advokasi. Mereka dapat menjadi pemimpin dalam memperjuangkan

keadilan, hak asasi manusia, mendukung pluralisme dan toleransi, serta berkontribusi didalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan juga berkelanjutan.

Selain itu, dengan pemahaman terhadap pancasila, mahasiswa juga mampu mengkritisi kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila, serta menjadi suara yang mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya mempertahankan dan menghormati nilai-nilai tersebut dalam setiap keputusan dan tindakan. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai pancasila, mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi elemen kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa indonesia untuk menuju pemerintahan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial, sesuai dengan semangat pancasila. Dunia akademik merupakan arena pengetahuan, dimana pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan serta juga menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan masyarakat. Hanya dilingkungan perguruan tinggi, ilmu pengetahuan benar-benar dikembangkan, bukan hanya ditingkat pendidikan yang lebih rendah atau ditempat lain. Universitas adalah komunitas akademik yang mengutamakan otonomi ilmu pengetahuan melalui dari kebebasan akademik di setiap bidang ilmu

pengetahuan dan penelitian yang mereka geluti. Demikian juga, mahasiswa diharapkan untuk belajar lebih kritis, sistematis, dan taat pada asas, serta memiliki motivasi dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat.

Dalam menghadapi setiap tantangan zaman yang semakin kompleks, penerapan nilai-nilai pancasila di lingkungan kampus menjadi semakin penting. Oleh karena itu, perlu strategi -strategi yang komprehensif dan juga berkelanjutan. Pembuatan kebijakan yang berakar pada prinsip-prinsip pancasila menjadi landasan yang kuat, didukung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada semua komponen kampus untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Melalui proses monitoring dan evaluasi yang teratur, kampus dapat terus mengawasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat adalah Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila lahir melalui proses panjang perjuangan para pendiri bangsa yang menginginkan dasar negara yang

mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan hukum di Indonesia. Seluruh peraturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tercipta keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang memberikan arah dan pedoman dalam bersikap, bertindak, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.

Di era perkembangan zaman dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, musyawarah, serta keadilan sosial harus terus dijaga dan diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, persatuan dan keutuhan bangsa dapat terus terpelihara sehingga cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, Rahardjo, K. A., Komarudin, Sabarudin, M., Lakalet, L., Rofi'ah, H., Gunawan, A., Imadudin, M., Zahri, T. A., Al Ayyubi, I. I., Lubis, P. H., Emillia, Sutrisman, D., & Sula, I. P. (2024). *Pancasila: Kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasi*. Future Science Publisher.
- Octavionica, D., Kadwa, I. I., & Evelyn, M. F. (2023). Sejarah perumusan Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 284–289. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/78927>
- Jakni, J. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi* (Cetakan ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, M., Claudia, W. A., & Andriani, Y. (2025). Sejarah lahirnya Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2877–2881. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24718>
- Saidurrahman, S., & Arifinsyah, A. (2020). *Pancasila: Moderasi negara dan agama sebagai landasan moral bangsa*. Jakarta: Kencana. ISBN 9786232185227.
- Wahyuni, A. P., Ningsih, P. A., & Alvianty, T. (2025). Sejarah lahirnya Pancasila dan proses perumusannya melalui sidang

BPUPKI dan PPKI. *Jurnal
Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6),
95–100.
[https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.
6931](https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6931)